

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terorisme berbasis agama Islam telah menjadi masalah kompleks bagi beberapa negara selama beberapa dekade. Secara tradisional, hubungan di antara kelompok-kelompok ini relatif lemah, dan sebagian besar beroperasi hanya di negara atau pulau mereka sendiri, dengan fokus pada isu-isu domestik seperti mempromosikan adopsi hukum Islam (Syariah) dan mencari kemerdekaan dari kendali pemerintah pusat.

Filipina telah mengalami gerakan separatis Muslim yang kejam selama lebih dari satu abad. Orang Moro di Mindanao dan Kepulauan Sulu, termasuk pulau Jolo, melakukan pemberontakan yang keras kepala, berdarah, dan akhirnya sia-sia melawan pendudukan Amerika di Filipina selatan setelah Perang Amerika Spanyol (1898). Namun, sampai saat ini, aktivitas beberapa kelompok ekstremis Muslim di Filipina hanya terbatas pada wilayah mayoritas Muslim yang relatif terisolasi di Selatan. Di Indonesia, berbagai aliran pemikiran Islam telah bersaing untuk mendapatkan pengikut dan perhatian publik, tetapi sebagian besar belum menyerukan negara Islam.

Kelompok moderat -- baik modernis maupun tradisional -- menjadi oposisi hukum utama rezim Suharto yang berakhir pada Mei 1998. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Presiden pertama yang terpilih secara demokratis setelah runtuhnya rezim Suharto, dan Amien Rais, saat ini ketua majelis tinggi parlemen, adalah pemimpin dari dua partai politik Muslim terbesar. Keduanya mengejar agenda politik yang sebagian besar sekuler.

Demikian pula, arus utama Islam di Malaysia sebagian besar bersifat apolitis, meskipun pada akhir 1990-an terjadi potensi pemilihan yang signifikan menuju partai Islam radikal, Parti Islam se-Malaysia (Pas), yang menyerukan agar Malaysia menjadi negara Islam. Terlepas dari perolehan penting dalam pemilihan November 1999, Pas masih hanya memiliki 27 kursi di parlemen dengan 193 kursi dan hanya mengendalikan dua dari 13 negara bagian Malaysia, tetapi setidaknya hingga upaya baru-baru ini oleh pemerintah Malaysia untuk menghubungkan Pas dengan ekstremis Islam, pengaruhnya telah berkurang.

Kemunculan gerakan Islam radikal dapat ditelusuri dari keterkaitan beberapa fenomena. Di antaranya adalah reaksi terhadap globalisasi -- yang secara khusus diasosiasikan dengan Amerika Serikat di benak para elit regional -- frustrasi terhadap represi oleh pemerintah sekularis, keinginan untuk menciptakan Asia Tenggara yang pan-Islami, reaksi terhadap pendudukan Israel di Tepi Barat dan Jalur Gaza, dan kedatangan veteran teroris yang berperang bertahun-tahun di Afghanistan. Penempaan koneksi antara Al Qaeda dan kelompok Islam radikal domestik di Asia Tenggara adalah bagian dari tren ini. Yang menjadi masalah kemudian adalah bagaimana cara menangani dan mencegah tindak terorisme itu. Kesulitan yang dihadapi adalah kenyataan bahwa kegiatan terorisme telah melintas batas antar negara. Masalah “metode” penanganan terhadap terorisme global inilah yang terus menerus menimbulkan pro kontra. Substansi dari masing-masing negara terhadap terorisme global sama, yakni harus dicegah dan diberantas karena sangat bertentangan dan mengancam perdamaian, stabilitas, dan keamanan internasional. Namun, cara atau metode yang harus ditempuh belum ada kesepakatan yang bersifat global.

Berkaitan dengan terorisme berideologi Islam, sesuatu nyata yang ditulis dalam sejarah yang sangat luar biasa terjadi, Amerika Serikat, Afghanistan jatuh ke tangan Taliban kembali, dalam kurun yang singkat, pada 15 Agustus 2021, di luar adanya perkiraan intelijen Amerika Serikat (AS). Apa yang membuat peristiwa itu luar biasa adalah bahwa pasukan AS dan sekutu mereka telah bertahun-tahun memerangi Taliban. Kembalinya Taliban di sebagian provinsi serta kota besar, dalam hitungan minggu saja, membuat pemerintah pasrah. Taliban berhasil melancarkan ofensif dan merebut kembali Kunduz, Kandahar, serta Mazhar- i- Sharif, simbol sukses pembalasan AS atas 9/ 11. Ibukota Kabul, direbut Taliban dalam satu hari saja, sebab Ghani bukannya mati- matian mempertahankan Kabul, tetapi melarikan diri ke Uni Emirat Arab (UEA) (Nainggolan, 2021).

Setelah penaklukan Mazari Syarif pada tahun 1998 dan pengumpulan kontrol wilayah sebesar 90% atas Afghanistan, Taliban bertahan pada benteng-benteng pengamanan di utara, bertahan dalam meredam Aliansi Utara dan mencoba terus mengonsolidasi kekuatan. Namun yang terpenting, gebrakan-gebrakan Aliansi Utara sejak tahun 1998 telah digantikan oleh anasir-anasir intervensi Amerika Serikat. Di

samping itu, selain isu HAM, Amerika Serikat telah mengantongi kartu lain untuk bisa “menggugat Taliban”.

Adanya drama terorisme seperti Taliban bukanlah hal yang asing di dunia hubungan internasional, karena terjadinya hal tersebut menjadi kasus yang hangat di wilayah regional hingga global, kasus tersebut juga bisa berpengaruh pada kebijakan politik pada setiap negara dunia. Pergerakan dan kasus terorisme hadir dan berkembang menjadi ketakutan tersendiri bagi negara-negara kawasan internasional, ini dikarenakan ancaman terorisme dapat terjadi kapan saja dan dimana saja serta dapat mengancam keselamatan jiwa, termasuk warga negara kapanpun dan dimanapun.

Berakhirnya perang Dingin, dunia mengalami perubahan-perubahan cepat dan mendasar diberbagai bidang yang pada gilirannya mengakibatkan berlanjutnya proses transformasi luas pada peta politik dan ekonomi global serta pada pola hubungan antar negara. Paling tidak terdapat empat perubahan mendasar yang akan turut menentukan wujud tatanan politik dunia.¹⁴ Pertama, kecenderungan ke arah perubahan dalam konstelasi politik global dari suatu kerangka bipolar mengarah ke kerangka multipolar. Kedua, menguatnya gejala saling ketergantungan (interdependensi) antar negara dan saling keterkaitan (interlink age) antar masalah global diberbagai bidang, politik, keamanan, ekonomi, dan lingkungan hidup. Seiring dengan itu, semakin menguat pula dampak globalisasi dengan segi implikasinya, baik yang positif maupun yang negatif. Ketiga, meningkatnya peranan-peranan aktor non pemerintah dalam tata hubungan antar negara. Keempat, munculnya isu baru dalam agenda internasional, seperti masalah HAM, intervensi humaniter, demokrasi, good governance, civil society, lingkungan hidup dan pemberantasan korupsi. Dengan demikian, perubahan tata politik global pasca perang Dingin telah menggeser isu high politics menjadi low politics (Pangestu, 2000) .

Konflik terorisme yang mengakar selama dua decade ini akhirnya berakhir pada kemenangan Taliban dalam menduduki Afghanistan. Taliban sendiri merupakan gerakan suatu kelompok keagamaan yang berasal dari madrasah Islam di sekitaran Provinsi Qandahar sejak 1994. Gerakan ini bermula dari peristiwa perang dingin, dimana perlombaan ideologi antara barat dan timur berusaha untuk menarik banyak pengikut. Sejak 1978, invasi dilakukan oleh Uni Soviet ke Afghanistan. Kelompok anti-soviet pun didukung oleh Amerika Serikat dan Pakistan, serta CIA yang secara diam-diam menyuplai senjata serta dana bagi pejuang Afghanistan. Taliban bermula dari pemikiran

yang diajarkan oleh Shah Waliullah, dimana ajaran agamanya berporos dari Deobandi, India (Martin, 2004).

Taliban menggambarkan diri mereka sendiri dan mengklaim legitimasi atas dasar menjadi 'jihadis' dan ingin mendirikan kembali sistem Islam, yang sebenarnya masih belum jelas bagaimana legitimasinya. (Sedra, 2013). Sementara itu, Afghanistan memiliki geografis berupa padang pasir dengan pegunungan tinggi, sehingga membuat sebagian besar penduduknya tinggal di pedesaan yang berupa suku dibandingkan dengan hidup perkotaan. Dari sana, terbentuklah berbagai macam etnis dengan populasi yang didominasi oleh Pashtun. Sebagai etnis mayoritas di Afghanistan, maka prinsip hidup masyarakat menyesuaikan dengan ajaran Islam, norma-norma, serta adat istiadat suku Pashtun. Dominasi ini sudah terjadi sejak monarki Durrani Pashtun yang sempat menciptakan Afghanistan-Pashtun. Kemudian monopoli etnis ini berhenti saat Uni Soviet datang menginvasi Afghanistan. Perlawanan terhadap bangsa asing berhasil dilakukan, tetapi setelah itu malah terjadi perang etnis oleh kelompok Tajik yang didukung oleh Uzbekistan dengan kelompok Pashtun yang didukung Palestina. Taliban pun muncul untuk mengembalikan hegemoni Pashtun.

Sejak itu Taliban menjadi negara medan perang internal melawan maupun eksternal melawan teroris. Perlindungan yang diberikan Taliban kepada pelaku terror Al-Qaeda membuat Amerika Serikat perlu melakukan tindakan represif. Perilaku agresif membuat Taliban dinilai oleh negara-negara barat bahwa Taliban dapat membahayakan hegemoni ideologi global. Dan memang Taliban sendiri telah melakukan berbagai aksi pelanggaran Hak Asasi Manusia di Afghanistan. Gerakan ini didominasi oleh orang-orang Pashtun yang biasanya menganut aliran Sunni garis keras. Taliban identik dengan keikutsertaannya pada konflik di Afghanistan. Di sisi lain, pemerintah Afghanistan telah melakukan berbagai upaya untuk membangun kembali Afghanistan melalui peningkatan relasi dengan negara-negara lain. Hingga hari ini, didapati masih sangat sulit untuk mencapai kesepakatan antara Taliban dengan Pemerintah Afghanistan untuk bisa berdamai. Selain itu, Taliban juga mengklaim telah menduduki berbagai distrik dan jalur penyeberangan di perbatasan kawasan utara dan barat wilayah Afghanistan (CNNIndonesia.com, 2021).

Semenjak rezim Taliban berkuasa, sistem peraturan perundang-undangan dibuat sesuai dengan hukum Islam. Taliban mempraktikkan hukum yang bersumber pada

interpretasi Islam yang ultra-konservatif. Pria diperintahkan berjenggot serta berserban, sedangkan hak-hak sipil paling utama wanita dikekang: dilarang bersekolah, lapangan kerjanya sangat dibatasi, harus didampingi anggota keluarga pria kala bepergian, serta dituntut menutupi seujur badan dengan burkak di tempat universal. (Ahmad, Afghan Women: The State of Legal Right and Security, 2006).

Sejak berdirinya hingga saat ini Taliban memang identik dengan keikutsertaan mereka pada konflik di Afghanistan, dari mulai perlawanan atas Uni Soviet hingga penolakan intervensi asing terhadap urusan dalam negeri Afghanistan. Namun di pihak lain, pemerintah Afghanistan mencoba membangun hubungan dengan negara-negara lain untuk membangun kembali Afghanistan. Karena hal tersebut hingga hari ini begitu sulit mencapai kesepakatan antara pemerintah Afghanistan dengan Taliban untuk berdamai. Digulingkannya kekuasaan kelompok Taliban ini dikarenakan adanya pasukan AS pada 2001, tetapi kelompok ini sudah melaksanakan serbuan dalam sebagian bulan terakhir serta saat ini hampir memahami kembali negeri Afghanistan tersebut. Di dasar kendali Taliban, kehidupan warga sangat dibatasi. Siaran tv serta radio dikendalikan penuh oleh Taliban, cuma tayangan yang bernuansa Islami yang diperbolehkan. Banyak perihal dilarang, dari mulai alkohol, bioskop, musik serta fotografi. Tercantum akses internet, cat kuku, kaos kaki putih buat wanita, tv, apalagi radio. Di dasar sistem hukum syari' at Islam secara ketat, rezim Taliban membangun stabilitas keamanan serta stabilitas kekuasaan sepanjang sebagian tahun dari perselisihan antar faksi mujahidin. (Ahmad, Afghan Women: The State of Legal Right and Security, 2006).

Pada masa kekuasaan inilah, beberapa tahun suasana keamanan sedikit terkontrol. Taliban dengan cepat kehilangan dukungan internasional dan domestik karena kelompok itu memberlakukan kepatuhan yang ketat interpretasinya tentang Islam di daerah-daerah yang dikontrolnya dan menerapkan hukuman yang keras, termasuk eksekusi publik, untuk menegakkan keputusannya, termasuk larangan televisi, musik Barat, dan tarian.

Dalam kehilangan dukungan ini, AS ikut mengambil peran yang cenderung senang menggunakan kekuatan militer ketimbang negosiasi dan diplomasi. Inilah yang merupakan jawaban sekaligus penjelasan atas tindakan AS melakukan pengeboman terhadap Afghanistan. AS tidak mau melakukan negosiasi untuk mencapai kompromi. Negosiasi dilakukan setelah upaya penyerangan berhasil dilakukan.

Upaya penyelesaian masalah secara realistis, praktis, cepat dan mudah ini selalu menjadi kebiasaan buruk militer AS sejak dahulu. Secara historis, ini dapat dilihat mulai dari penjatuhan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, Invasinya terhadap Haiti, Operasi “carpet bombing” di Vietnam dan Kamboja, pemboman AS terhadap Libya tahun 1998, serangan dan embargo atas Irak sampai dengan penyerangan AS atas Afghanistan “hanya” untuk menangkap seorang yang bernama Osama Bin Laden. Realisme politik yang selalu ditampilkan oleh AS ini sebenarnya tidak dapat menyelesaikan persoalan secara komprehensif dan tuntas. Bahkan, penggunaan kekuatan dan daya paksa semacam itu hanya akan menimbulkan resistensi dan perlawanan yang keras dari rezim Taliban. Dan yang dikhawatirkan lagi adalah timbulnya solidaritas dari umat Islam di seluruh dunia yang mengancam akan melakukan jihad Islam, meskipun hal itu bukan dalam konteks perang agama.

US seharusnya mulai menghapuskan realisme politik yang selama ini di praktekkan pada negara-negara yang dia anggap sebagai “pembangkit dan teroris”.

Sebagai negara yang mengaku campaiun demokrasi, AS harus memprakarsai sendiri upayaupaya penyelesaian konflik dengan rezim Taliban melalui prosedur-prosedur demokratis dan mekanisme negosiasi untuk mencapai kompromi. Semua tentu sependapat dan yakin apabila para pemimpin Taliban diajak bernegosiasi dan saling memberikan konsesi-konsesi, kompromi akan tercapai dan konflik AS-Afghanistan akan cepat berakhir. Namun, semua juga tidak tahu apa maksud lain AS menyerang Afghanistan. Presiden AS, George W. Bush, mengatakan bahwa serangan dan pemboman yang dilakukan oleh Pasukan militer AS dan dibantu dengan Inggris mempunyai tiga tujuan utama. Pertama, untuk menangkap Osama Bin Laden sebagai otak dari tragedi 11 September atau Selasa kelabu yang dianggap berada di negeri “orang bersorban” ini. Kedua, untuk menghancurkan jaringan Al Qaeda beserta jaringan terorismenya diseluruh dunia. Ketiga, untuk menggulingkan rezim Taliban yang dia anggap melindungi Osama Bin Laden.

Namun, beberapa kalangan mensinyalir bahwa selain ketiga tujuan di atas, AS mempunyai motivasi lain dalam menyerang Afghanistan. Motivasi itu adalah motivasi geografis dan ekonomis. Secara geografis, serangan balasan militer AS atas Afghanistan saat ini yang dilakukan secara sepihak, memunculkan kecurigaan akan kemungkinan adanya ambisi AS ingin menguasai kawasan Asia Tengah dan Laut Kaspia yang

merupakan wilayah yang sangat strategis bagi sistem pertahanan globalnya. Letak dan posisi Afghanistan yang berada di sebelah timur Iran sangat kondusif untuk “memataimatai” setiap perkembangan yang terjadi di Iran, Irak, dan negara-negara di kawasan Timur Tengah lainnya. Apabila AS dapat mendudukkan pemerintahan yang pro Washington di Afghanistan, hegemoninya atas Asia Tengah dan Timur Tengah akan semakin kuat dan besar. Secara ekonomis, disinyalir bahwa kawasan Asia Tengah dan Laut Kaspia dikenal menyimpan cadangan minyak bumi terbesar kedua setelah kawasan Arab Teluk. Jika AS berhasil menancapkan kukunya di Afghanistan, negara adidaya ini akan dengan mudah menguasai sumber-sumber ekonomi dan potensi mineral yang sangat melimpah dan belum tergarap di kawasan ini. Selama ini, kepentingan-kepentingan ekonomi AS di Asia Tengah hanya berfokus pada India dan Pakistan. Kepentingan-kepentingan ekonomi AS di Afghanistan terganggu sejak naiknya rezim Taliban menduduki pemerintahan dengan menggulingkan presiden Burhanudin Rabbani tahun 1996.

Oleh karena itu, jika serangan udara yang kemudian dilanjutkan dengan serangan darat AS terhadap Afghanistan ini berhasil menggulingkan rezim Taliban, secara otomatis hegemoni ekonomi AS di kawasan ini akan berjalan dengan mulus tanpa tantangan. Indikasi adanya motif geografis-ekonomis ini tentunya membuat gerah negeri kaum Mullah, Iran. Sebagai negara yang berpengaruh di kawasan ini dan adanya kepentingan Iran atas Afghanistan, membuat Iran mempunyai kecurigaan yang besar atas motivasi lain AS dibalik penyerangannya terhadap Afghanistan. Kepentingan Iran akan terancam jika AS hadir secara dominatif di kawasan Asia Tengah dan Laut Kaspia. Memang, Iran bermusuhan dengan rezim Taliban semenjak peristiwa penyanderaan dan pembunuhan 8 Diplomat Iran oleh orang-orang Taliban tahun 1998. Namun, Iran juga tidak menginginkan adanya intervensi dan hegemoni AS atas Afghanistan. Serangan udara dengan membombardir basis-basis kekuatan rezim Taliban dan instalasi militernya sejak 7 Oktober lalu yang dilakukan oleh Aliansi Internasional pimpinan AS membuat rezim Taliban semakin terjepit. Dikatakan demikian karena rezim Taliban juga menghadapi serangan domestik oposisi yang tergabung dalam Aliansi Utara. Aliansi Utara ini terdiri dari etnis minoritas Tajik dan Uzbek.

AS pun secara diam-diam juga mendukung dan membiayai perlawanan yang dilakukan oleh Aliansi Utara ini menggulingkan rezim Taliban.

Dampak destruktif dari konflik dan peperangan ini tentunya sangat dirasakan oleh penduduk sipil Afghanistan yang tidak berdosa dan tidak tahu apa-apa. Lebih dari 2 juta pengungsi Afghanistan membanjiri perbatasan Pakistan dengan kondisi yang sangat menegaskan. Belum lagi yang ada di kota-kota Afghanistan seperti Kabul, Kandahar dan Masar I Sharif dimana mereka telah menjadi korban dari serangan salah sasaran rudal-rudal pasukan militer AS. Kaum perempuan, Ibu-ibu dan anak-anak kecil telah menjadi korban dari sebuah tragedi perang yang tidak adil.

Melihat kondisi warga sipil yang terlunta-lunta menjadi korban perang dan adanya kekhawatiran akan serangan darat pasukan AS terhadap Afghanistan, seharusnya mendorong setiap negara dan organisasi internasional untuk mencari jalan keluar yang terbaik dalam mengatasi konflik AS-Afghanistan. Diperlukan suatu mekanisme mediasi yang dapat mempertemukan dan menyelaraskan kepentingan-kepentingan AS dan Afghanistan. Mekanisme militer yang dilakukan AS saat ini tentunya tidak dapat menuntaskan permasalahan pelik ini. Permasalahannya, siapa dan dalam kerangka apa mekanisme mediasi itu dilaksanakan? Jawaban atas pertanyaan ini tentu sulit untuk dijawab dan walaupun dijawab tentu akan sangat beragam jawabannya.

Taliban tidak memberikan adanya kebebasan langsung terhadap individu di negaranya dengan syariat hukum islam. Terlebih lagi terhadap kaum wanita, dimana wanita tidak memiliki hak dan kebebasan, dan mendedikasikan hidupnya hanya untuk melayani. Transisi ini memberikan kisah panjang dengan berbagai konflik dan pertumpahan darah dalam sejarah. (Ahmad, 2006).

Namun, pada dunia internasional pun Taliban menjadi pusat perhatian semenjak adanya kejadian WTC 11 September 2001, dimana Taliban berkerjasama dengan Al-Qaeda dan melakukan tindakan untuk melindungi Osama Bin Laden, yang pada saat itu merupakan incaran negara *super power* yakni Amerika Serikat jadi pada saat itu pun Amerika Serikat berusaha sekuat tenaga untuk mengejar dan meringkuk pimpinan Taliban dengan mengerahkan militernya ke negara Afghanistan demi kehancuran jaringan organisasi terorisme tersebut. Pada saat itu, Amerika Serikat dibantu oleh aliansinya yakni NATO untuk melakukan penyerangan baik melalui darat ataupun udara. (www.the-americaninterest.com, n.d.). Karena hal tersebut nama Taliban menjadi hal yang terhembus begitu kencangnya hingga terkenal ke seluruh penjuru dunia dan mendapatkan reaksi negatif oleh presiden Amerika Serikat yang pada saat itu bertahta

yakni George W. Bush yang membentuk adanya kebijakan baru pada 2002 yang bernama National Security Strategy yang bermaksud tujuan untuk menghancurkan kamp-kamp terorisme, dan memusnahkan massal terorisme agar tidak lagi mengganggu ketentraman keamanan nasional Amerika Serikat. (Frank, 2003).

Hal tersebut terus berangsur-angsur pada terjadinya penyerangan-penyerangan aksi militer AS yang dimulai pada 7 Oktober 2001, dengan serangan udara terhadap sasaran Taliban di seluruh negeri dan dukungan udara dekat untuk pasukan anti-Taliban di Afghanistan utara. Jumlah terbatas Pasukan Khusus Angkatan Darat AS, paramiliter Badan Intelijen Pusat (CIA) pasukan, dan beberapa pasukan darat konvensional mulai dikerahkan di Afghanistan kurang dari dua minggu kemudian. (Kassing, 2015).

Hingga masuk pada era pemerintahan Barack Obama, dimana secara terbuka Obama mengatakan bahwa mengumumkan kalau hendak lekas mungkin melaksanakan pembedahan militer Khanjar di Daerah Sungai Helmand, Afghanistan. Amerika Serikat menugaskan dekat 4.000 pasukan marinir Amerika Serikat Serta dekat 650 tentara nasional Afghanistan yang ikut bergabung dalam pembedahan militer tersebut. pada tempat yang sama, pasukan ISAF terletak dibawah komando Inggris pula melaksanakan operasi militer yang diketahui dengan Panther' s claw operation. (dw, 2010).

Pengamat politik internasional Arya Sandhiyudha, mengungkapkan ada beberapa aspek utama Taliban dapat mengambil alih Afghanistan. Awal merupakan keadaan dalam negara Afghanistan, ialah ketiadaan persatuan akibat kepemimpinan yang tidak efisien dan krisis keyakinan sebab koruptif. Aspek kedua, merupakan ketergantungan negeri tersebut pada angkatan hawa Amerika Serikat (AS), sehingga sehabis kebijakan tarik mundur pasukan, hingga pemerintah Afghanistan langsung melemah. Aspek ketiga ialah Taliban yang mempraktikkan perjanjian amnesti kepada tentara kala proses penaklukan sebagian kota. Tidak hanya itu, aspek selanjutnya merupakan penguatan angkatan bersenjata Taliban sendiri yang menaikkan energi tawar perundingan. Aspek kelima, ialah banyak tentara Afghanistan disersi serta menyerah, dan terakhir, yakni sebagian pejabat pemerintah menyetujui transisi kekuasaan demi menghindari pertumpahan darah dan dampak yang lebih destruktif. Pihak Taliban berjanji tidak ada pertumpahan darah dalam merebut kekuasaan. Dalam sebuah pernyataan lebih lanjut Taliban menjanjikan akan menghormati hak-hak perempuan Afghanistan, melindungi warga asing, dan seluruh masyarakat negara itu. (Candraditya, 2021).

Konflik yang terjadi di Afghanistan dan kemenangan Taliban atas Pemerintahan Afghanistan merupakan hal yang menarik untuk diteliti karena permasalahan ini telah menarik perhatian dunia dan melibatkan berbagai negara dalam permasalahan tersebut. Karena latar belakang yang penulis sampaikan, dimana negara Afghanistan sekian lamanya dilanda konflik internal, perang kerabat, dan invasi serta pendudukan asing. Sehabis penarikan total militer AS, timbul persoalan, untuk apa AS wajib menginvasi negeri Afghanistan dan menjatuhkan rezim Taliban pasca- 9/ 11 serta mendudukinya sepanjang nyaris 20 tahun, bila pada kesimpulannya wajib menyerahkan kembali negara ke rezim anti- demokrasi dan pro- kebijakan represif tersebut?

Penulis sendiri tertarik untuk melakukan riset lebih lanjut terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kemenangan Taliban di Afghanistan. Berdasarkan landasan tersebut lalu peneliti akan melakukan pemetaan permasalahan dan dianalisis sesuai bidang keilmuan pada hubungan internasional. Berdasarkan uraian diatas, maka dilakukan penelitian dengan judul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemenangan Taliban di Afghanistan”.

Berikut ialah beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yakni penelitian yang berjudul “*Network Centric Warfare* dan Perang Asimetris di Afghanistan” yang ditulis oleh Aziz Rahmani. Penelitian ini menjabarkan mengenai permasalahan Amerika Serikat yang tidak dapat menang di perang asimetris di Afghanistan. Penelitian ini memberikan hasil jika jaringan kelompok yang melakukan perlawanan dan jaringan kebudayaan lokal lah yang membuat adanya pertahanan kelompok terorisme di Afghanistan. Digunakan metode, sumber informasi sekunder yakni seperti artikel, internet, buku, dan situs-situs. Karena area yang bersifat kultural, maka peneliti melihat diperlukan adanya pengenalan pola kultural warga daerah dilihat dari kesehariannya: seperti, gaya berpakaian, metode hubungan, gaya bahasa. Sebab kelompok terorisme di wilayah Afghanistan sering menggunakan nilai kultural ini menjadi dalih agar jejaring organisasinya tidak teridentifikasi. (Rahmani, 2018).

Referensi kedua yakni berjudul “Taliban di Afghanistan: Tinjauan Ideologi, Gerakan dan Aliansinya dengan ISIS” yang ditulis oleh A Ashgor. Penelitian tersebut berusaha menguraikan adanya ideologi Gerakan Taliban di Afghanistan, dimana gerakan Taliban sendiri memang sudah berada didalam buku sejarah pergerakan terorisme dan

memiliki eksistensi pada wilayah global karena Gerakan terorisme ini merupakan gerakan radikal berbasis jihad anarki. Peneliti berusaha menjabarkan jika adanya terorisme Taliban ini didasari oleh adanya konflik wilayah nasional yang dengan mudahnya bertransformasi sehingga menumbuhkan gerakan terorisme global dengan membangun adanya kerjasama dengan berbagai faksi, seperti contoh: Jihadis, dari al-Qaeda hingga ISIS. Taliban, ISIS, dan al-Qaeda, yang meskipun memiliki perbedaan strategi namun tetap lahir berdasarkan ideologi yang sama yakni tafsir syariat Islam. (Ashghor, 2021).

Referensi yang ketiga berjudul “Ancaman Terorisme Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) Pasca Fase “Khilafah” yang ditulis oleh Wibowo dan Hapsari. Dimana isi dari penelitian ini ialah soal kolaborasi eksistensi dan strategi terorisme ISIS pasca perang Baghouz. Sejak Perang Baghouz pada Maret 2019, beberapa pemimpin negara mengumumkan kemenangan atas ISIS sekaligus mengumumkan berakhirnya “khilafah” ISIS yang pernah dideklarasikan tahun 2014. Peneliti menjabarkan keeksisan ISIS yang masih terjaga oleh adanya ISIS yang masih melakukan serangan gerilya secara berkala pada bekas basis teritori pusat “khilafah” ISIS, yaitu Syria dan Irak. Sementara, di beberapa tempat lain, seperti kawasan Asia, Afrika dan Eropa, ISIS mengandalkan strategi terorisme. Keeksisan ISIS ini masih terjaga meskipun sebagian pemimpin negara telah mendeklarasikan kealahannya, namun, ISIS masih mendeklarasikan kelompoknya yakni entitas “khilafah” meskipun tidak lagi memiliki kuasa teritori. Peneliti juga menjabarkan, bagaimana strategi baru ISIS berjalan, strategi tersebut berupa *franchise dan lone wolf terrorism* oleh ISIS menonjol pada fase pasca “khilafah.”. Peneliti menggunakan adanya metode studi literatur dan wawancara, literatur tersebut berupa dokumen yang dirilis oleh ISIS, transkrip pidato, rekaman video. Juga didukung dengan hasil wawancara dengan narasumber yang memiliki kapasitas dan memiliki pengalaman “muhajidin.”. (Wibowo & Hapsari, 2020).

Referensi keempat berjudul “Tantangan Binadamai: Kegagalan Demokratisasi Pasca Konflik Sipil di Afghanistan” yang ditulis oleh Irza Khurun’in. Dimana dalam penelitian ini peneliti menjabarkan mengenai peran pihak internasional yang diperlukan untuk menciptakan perdamaian dalam konflik Afghanistan yang dianggap sudah berkepanjangan. Kondisi dan karakteristik berbeda yang dimiliki tiap negara menjadikan pendekatan binadamai ini yang seringkali dikaitkan dengan demokrasi menjadi sulit terealisasi.

Beberapa contoh daerah lainnya yang gagal dengan pendekatan ini adalah Irak, Rwanda, dan Kosovo. Begitupun dengan Afghanistan yang turut menjadi salah satu aktivitas binadamai yang gagal menghasilkan demokrasi. Faktor utama yang menjadi keberhasilan dari proses ini adalah persamaan prioritas antara elit domestic dengan aktivis perdamaian. Sehingga dapat dikatakan kerja sama yang baik antara host country dengan lembaga internasional dapat menyukkseskan binadamai.

Namun, peneliti juga menjabarkan mengenai kegagalan dalam peran melakukan peredamaian tersebut. Menggunakan pendekatan *postwar democratic transition* peneliti menganalisis kegagalan binadamai tersebut yang memiliki indikator. dimana pertama, masih memiliki presentase GDP yang rendah. Dalam artian, kondisi ekonomi Afghanistan terbilang belum stabil dengan tingkat demokrasi yang juga rendah. Selain itu dari segi indeks pembangunan manusia juga cenderung stagnan dan minim tindakan. Kedua, adanya tingkat korupsi yang tinggi di badan pemerintahan dibarengi dengan kapasitas administasi yang kurang dapat diandalkan. Ketiga, dari segi kondisi geopolitik Afghanistan yang merupakan pegunungan dan lembah sehingga menyulitkan mobilitas. Keempat, program *peacebuilding* yang tidak berjalan dengan lancar; dan yang terakhir yakni tidak adanya persamaan preferensi antar elit politik domestik Afghanistan dengan aktivis perdamaian (Khurun'in, 2016).

Referensi kelima berjudul “Kedudukan United Nations Assistance Mission in Afghanistan (Unama) dalam Membagikan Proteksi Hak Asasi Manusia diAfghanistan pada Tahun 2009- 2012” yang ditulis oleh Ahmad Fuadi. Peneliti dalam penelitiannya menjabarkan secara rinci mengenai peran dari UNAMA dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia di Afghanistan pada tahun 2009-2012. UNAMA merupakan salah satu sambungan dari PBB untuk melakukan berbagai upaya atas hak asasi manusia secara individu bagi warga negara Afghanistan agar tercipta suasana dan keadaan yang damai serta kondusif. Upaya tersebut ditempuh dengan bermacam cara, misalnya mengupayakan agar setiap warga negara Afghanistan mendapat perlindungan hak asasi manusia yang memadai, memberikan perlindungan bagi para tahanan yang mengalami kekerasan, membantu proses rekonstruksi dan rekonsiliasi, dan juga memberikan tempat yang aman bagi perempuan. UNAMA mendorong pemerintahan Afghanistan untuk memperkuat adanya upaya perlindungan HAM di Afghanistan sesuai dengan hukum hak asasi manusia, baik secara hukum yang berlaku di Afghanistan maupun hukum

internasional. Selain itu, UNAMA berusaha mendapatkan perhatian global guna membantu permasalahan keamanan regional Afghanistan (Fuadi, 2014).

Referensi keenam berjudul “ Kebijakan Militer Pemerintah Amerika Serikat dalam Memerangi Kelompok Taliban di Afghanistan pada Kepemimpinan Barack Obama Periode 2009- 2012” yang ditulis oleh Siti Hardiyanti. Dalam penelitian ini penulis menganalisis kebijakan smart power atau kebijakan yang lebih strategis dan logis yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat dengan mengupayakan kerjasama serta perundingan. Dalam kebijakan tersebut Obama terlebih dahulu melakukan kerjasama dengan pemerintah dan militer Afghanistan kemudian mengirimkan pasukan militer Amerika Serikat ke wilayah Afghanistan, mendirikan pangkalan militer, melatih tentara nasional Afghanistan serta melakukan berbagai operasi militer.

Peneliti juga menjelaskan mengenai kepentingan yang dimiliki Amerika Serikat dalam melakukan kebijakan tersebut, dimana Amerika Serikat mengetahui Afghanistan memiliki posisi negara sebagai *pipeline geostrategy* yang dapat menguntungkan negara China serta Rusia. Melalui negara Afghanistan beberapa jalur minyak dari Asia yang menghubungkan ke wilayah China dan Rusia. Penguasaan wilayah di Afghanistan menjadi keuntungan tersendiri untuk Amerika Serikat sebagai bentuk kontrol yang cukup kuat terhadap negara saingan Amerika Serikat yaitu Rusia dan China. (Hardiyanti, 2018).

Referensi ketujuh berjudul “Faktor-Faktor Determinan dalam Pergantian Kebijakan Kontraterorisme Amerika Serikat di Afghanistan Pada Masa Pemerintahan Presiden Donald Trump” yang ditulis oleh Muhammad Luqmanul Hakim. Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana sikap Amerika Serikat dalam menangani permasalahan yang terjadi di Afghanistan dari segi Kebijakan yang diterapkan oleh Barack Obama dan Donald Trump. Saat era kepemimpinan Obama, prioritas utamanya adalah mengalahkan Al-Qaeda dan mengagalkan semua upaya yang dilakukan untuk membangun kembali jaringan terorisme. Setelahnya, AS ingin mempromosikan tata kelola pemerintahan yang baik dengan membangun infrastruktur juga menghilangkan korupsi dalam badan politik (Hakim, 2019).

Lain halnya dengan kebijakan Donald Trump yang memprioritaskan kepentingan warga negaranya sendiri dengan slogan “America First”. Seperti yang disebutkan dalam kampanye, Trump akan berusaha melindungi warga negaranya dari aksi Terorisme dengan menghancurkan Gerakan tersebut sampai ke akarnya. Faktor lain juga didukung

oleh rezim pemerintahan Taliban yang semakin kuat, sehingga diperlukannya penambahan jumlah pasukan di Afghanistan. Selain itu, negara tetangga Afghanistan yang tadinya menjadi sekutu Amerika Serikat dalam memerangi Taliban, yaitu Pakistan, dianggap turut menampung teroris disana. Hal itu dikonfirmasi oleh para pemimpin maupun komandan militer AS yang mengaitkan berbagai aksi pemberontakan langsung maupun tidak langsung dengan Pakistan. Kebijakan berganti terkait dengan dinamika global yang terjadi.

Referensi kedelapan berjudul "Negotiating with the Taliban: issues and prospects" yang ditulis oleh Giustozzi dan Antonio. Menjelaskan mengenai ketahanan pemberontakan Taliban di Afghanistan selama setengah lusin tahun terakhir telah menghilangkan ilusi "kemenangan" militer tidak termasuk mereka, dan mengakhiri perang tiga puluh tahun di Afghanistan tampaknya pasti akan melibatkan reintegrasi mereka dalam beberapa bentuk ke dalam politik Afghanistan. Dalam mempertimbangkan kemungkinan negosiasi dengan Taliban, satu kekhawatiran khusus adalah seberapa bersatu, atau tidak bersatu, Taliban sebenarnya: Apakah kontrol yang dilakukan oleh kepemimpinan Taliban cukup kuat untuk memenuhi penyelesaian yang dinegosiasikan, Atau apakah kontrol cukup lemah untuk memungkinkan dengan mudah mengkooptasi atau membeli komandan individu, Menghindari mengejar penyelesaian dengan kepemimpinan politik? Laporan oleh Antonio Giustozzi, yang ditulis sebagai bagian dari The Century Foundation Project on Afghanistan in Its Regional and Multilateral Dimensions, menjabarkan bagaimana Taliban terstruktur dan terorganisir, dengan tujuan untuk menilai dampak organisasi mereka dan modus operandi pada kesediaan mereka untuk bernegosiasi dan menghormati penyelesaian politik. (Giustozzi, 2010).

Referensi kesembilan berjudul "Afghanistan: Post-Taliban Governance, Security, and U.S. Policy" yang ditulis oleh Katzman dan Kenneth. Yang menganalisis soal pasca dua tinjauan kebijakan tingkat tinggi di Afghanistan pada tahun 2009, Pemerintahan Obama menegaskan bahwa mereka mengejar strategi militer-sipil yang sepenuhnya sumber daya dan terintegrasi yang dimaksudkan untuk membuka jalan bagi transisi bertahap ke kepemimpinan keamanan Afghanistan yang dimulai pada bulan Juli 2011. Laju transisi itu harus ditentukan oleh kondisi di lapangan. Kebijakan ini didasarkan pada pandangan bahwa menstabilkan Afghanistan akan memastikan bahwa itu tidak dapat lagi menjadi basis serangan teroris terhadap Amerika Serikat. Untuk membalikkan

memburuknya keamanan di sebagian besar Afghanistan sejak 2006, masing-masing dari dua tinjauan menghasilkan keputusan untuk menambah pasukan tempur, dengan maksud menciptakan kondisi untuk memperluas pemerintahan Afghanistan dan pembangunan ekonomi. Sebanyak 51.000 pasukan tambahan AS diberi wewenang oleh dua tinjauan, yang telah membawa tingkat pasukan AS menjadi sekitar 104.000 pada 4 September 2010, dengan pasukan mitra bertahan sekitar 40.000. Pada saat yang sama, Pemerintah berusaha untuk melawan persepsi di wilayah tersebut, terutama di antara Pakistan, India, pemberontakan Afghanistan, dan dalam pembentukan politik Afghanistan bahwa keterlibatan AS akan berkurang tajam setelah Juli 2011. Persepsi itu mungkin, di antara konsekuensi lainnya, mengobarkan persaingan tradisional antara Pakistan dan India, dalam hal ini untuk menyangkal pengaruh satu sama lain di Afghanistan. (crs.gov, 2017).

Referensi kesepuluh berjudul “Reconciliation with the Taliban: Challenges and Prospects” yang ditulis oleh Ayman. Tujuan dari artikel ini adalah untuk membahas tantangan dan prospek. Rekonsiliasi dengan Taliban dalam konteks Afghanistan Program Perdamaian dan Reintegrasi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut: Apa masalah utama AS yang mendesaknya untuk mencari negosiasi? dengan para pemberontak? Apa harapan di balik langkah itu? Cara mana upaya terakhir untuk berdamai dengan Taliban berbeda dari inisiasi sebelumnya. Mengapa upaya masa lalu untuk melucuti senjata para pemberontak dan memulai dialog politik tidak dapat mencapai hasil yang Dicari? Apa syarat untuk proses rekonsiliasi untuk Mengembangkan? Artikel ini mengeksplorasi tantangan utama dari strategi AS. Ia berpendapat bahwa apa yang dibutuhkan Afghanistan adalah perdamaian yang komprehensif. Proses pembangunan yang bukan penyelesaian politik di dalam arti sempit. (AYMAN, 2013).

1.2. Rumusan Masalah

Peperangan dua dekade di Afghanistan telah menjadi perhatian tersendiri bagi masyarakat internasional. Bukan hanya menjadi sarang bagi teroris dunia, ada pula konflik etnis yang terjadi di Afghanistan. Taliban sebagai gerakan yang mempunyai kekuatan dan kegigihan yang besar berhasil bertahan hingga saat ini telah menduduki pemerintahan Afghanistan. Dari kemenangan tersebut, ada banyak faktor yang dapat diteliti lebih dalam, sehingga penjabaran dari rumusan masalah dari penelitian ini adalah **apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kemenangan Taliban di Afghanistan?**

Brahma Syafrudin Putra, 2023

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMENANGAN TALIBAN DI AFGHANISTAN

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Hubungan Internasional

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini ialah menganalisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemenangan Taliban di Afghanistan. Kemudian dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Menganalisis dan mendeskripsikan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemenangan Taliban di Afghanistan.
- 2) Menganalisis dan mendeskripsikan mengenai aktor-aktor yang terlibat dalam konflik di Afghanistan.
- 3) Melakukan pemetaan permasalahan yang terjadi terkait konflik yang terjadi Afghanistan yang berkaitan dengan keterlibatan Taliban.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi terkait faktor apa saja yang mendukung kemenangan Taliban di Afghanistan baik secara internal maupun eksternal.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan gambaran besar kepada penulis terkait perkembangan konflik sampai terjadinya kemenangan Taliban dalam merebut kekuasaan. Selain itu penelitian ini juga bisa menjadi bahan evaluasi konflik dinamika global yang terjadi di Afghanistan serta pemetaan dan penyelesaian konflik antar kepentingan kelompok.

1.5. Sistematika Penulisan

A. BAB I

PENDAHULUAN

Pembahasan pada bab ini penulis menjelaskan secara menyeluruh mengenai latar belakang permasalahan yang diangkat terkait awal mula berdirinya Taliban, bagaimana dinamika permasalahan yang terjadi, serta sepuluh penelitian terdahulu

Brahma Syafrudin Putra, 2023

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMENANGAN TALIBAN DI AFGHANISTAN

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Hubungan Internasional

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

yang menunjang penulisan ini. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

B. BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjabarkan berbagai teori yang digunakan untuk mengulik kajian konflik Taliban yang terjadi di Afghanistan seperti, isu global kontemporer, isu global strategis, kebijakan luar negeri dan keamanan tradisional. Setelahnya penulis memaparkan kerangka pemikiran dan asumsi dasar atas permasalahan yang disebutkan dalam rumusan masalah.

C. BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis menjelaskan metode penelitian yang digunakan untuk membedah rumusan masalah. Mulai dari objek penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data, teknik analisis data, serta waktu dan lokasi penelitian.

D. BAB IV

E. PEMBAHASAN

Bab ini berisikan penjelasan secara menyeluruh mulai dari perkembangan konflik Taliban di Afghanistan dari awal hingga kemenangan, peran serta tindakan badan internasional dalam menyikapi konflik, juga faktor-faktor internal maupun eksternal yang mendukung kemenangan Taliban dalam menguasai Afghanistan.

F. BAB V PENUTUP

Pada bab terakhir penulis membuat kesimpulan yang ditarik dari penjelasan bab-bab sebelumnya, sehingga terdapat narasi singkat yang menjadi hasil dari penelitian ini.